



Vol. 2, No. 3, Maret Tahun 2025

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

# AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



**Diterbitkan oleh:**  
**Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh**

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian  
Orientasi Masyarakat**

# **JURNAL AMPOEN**

**Vol. 2, No. 3, Maret Tahun 2025**

**Halaman : 1461-1470**

## **PENGUATAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN KAMPUNG: STRATEGI TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG KELAPA LIMA MERAUKE**

**Willem Kabuam, Rosina Jostina Marise Kebubun, Esau Hombore**

**STISIPOL Yaleka Maro, Merauke**

### **Artikel di Jurnal AMPOEN**

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.3129>

### **Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini**

APA : Kabuam, W., Kebubun, R. J. M. ., & Hombore, E. . (2025). PENGUATAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN KAMPUNG: STRATEGI TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG KELAPA LIMA MERAUKE. Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 1461-1470. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.3129>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat** dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





Vol. 2, No. 3, Maret 2025

# **PENGUATAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN KAMPUNG: STRATEGI TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG KELAPA LIMA MERAUKE**

**Willem Kabuam<sup>1</sup>; Rosina  
Jostina Marise Kebubun<sup>2</sup>;  
Esau Hombore<sup>3</sup>**

- 1) Program Studi Ilmu  
Pemerintahan, STISIPOL  
Yaleka Maro, Merauke
- 2) Program Administrasi Publik,  
STISIPOL Yaleka Maro,  
Merauke
- 3) Program Administrasi Publik,  
STISIPOL Yaleka Maro,  
Merauke

\* Email Korespondensi:  
[wkambuam@gmail.com](mailto:wkambuam@gmail.com)

---

## **Riwayat Artikel**

Penyerahan : 03/03/2025  
Diterima : 04/03/2025  
Diterbitkan : 05/03/2025

## **Abstrak**

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan Kampung Kelapa Lima melalui pelatihan berbasis teknologi, implementasi sistem administrasi digital, peningkatan transparansi, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan meliputi identifikasi dan analisis situasi, penyusunan program, implementasi sistem administrasi digital, pemberdayaan masyarakat melalui forum diskusi dan survei aspirasi, serta monitoring dan evaluasi. Pelatihan diberikan kepada aparatur kampung guna meningkatkan kapasitas mereka dalam administrasi berbasis teknologi dan transparansi keuangan. Implementasi sistem digital memungkinkan proses pelayanan publik lebih efisien dan akurat, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan kampung. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ditingkatkan melalui mekanisme diskusi dan survei berbasis digital. Evaluasi menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan efektivitas kerja aparatur, mempercepat layanan administrasi, serta meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan kampung. Dengan pendekatan ini, tata kelola pemerintahan Kampung Kelapa Lima menjadi lebih modern, inovatif, dan berkelanjutan. Hasil program ini diharapkan dapat menjadi model bagi kampung lain dalam mengadopsi strategi serupa guna memperkuat sistem pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.

**Kata Kunci:** Manajemen Pemerintahan Kampung; Tata Kelola Desa; Pelayanan Publik; Transparansi dan Akuntabilitas; Pemberdayaan Masyarakat

## **Abstract**

This community service program aims to improve the governance of Kelapa Lima Village through technology-based training, the implementation of a digital administration system, increased transparency, and community empowerment in decision-making. The method used includes situation identification and analysis, program development, implementation of a digital administration system, community empowerment through discussion forums and aspiration surveys, as well as monitoring and evaluation. Training was provided to village officials to enhance their capacity in technology-based administration and financial transparency. The implementation of the digital system enables more efficient and accurate public service processes while strengthening government accountability. Additionally, community participation in decision-making was enhanced through digital-based discussion mechanisms and surveys. Evaluation results indicate that this program successfully improved the effectiveness of village officials, accelerated administrative services, and increased transparency and public engagement in village policies. With this approach, the governance of Kelapa Lima Village has become more modern, innovative, and sustainable. The outcomes of this program are expected to serve as a model for other villages to adopt similar strategies to strengthen a more transparent and participatory governance system.

**Keywords:** Village Government Management; Village Governance; Public Services; Transparency and Accountability; Community Empowerment



## PENDAHULUAN

Kampung Kelapa Lima di Merauke menghadapi tantangan dalam manajemen pemerintahan, terutama terkait tata kelola administrasi dan efektivitas pelayanan publik. Struktur pemerintahan kampung masih mengalami kendala dalam koordinasi antar aparaturnya serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal. Keterbatasan dalam perencanaan program dan pengelolaan anggaran menyebabkan beberapa kebijakan tidak berjalan dengan maksimal (Mukhlis 2024). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih perlu diperkuat untuk memastikan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga masih rendah, sehingga kebijakan yang diterapkan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga. Minimnya sosialisasi dan keterbukaan informasi mengenai program kampung menyebabkan kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pembangunan (Tamba and Machdum 2024). Selain itu, masih ditemukan kesenjangan dalam pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga dalam tata kelola pemerintahan kampung. Akibatnya, upaya kolaboratif antara pemerintah kampung dan masyarakat masih belum optimal dalam mencapai pembangunan yang berdaya guna.

Dalam aspek pelayanan publik, masih terdapat berbagai keterbatasan, terutama dalam akses terhadap layanan administratif dan sosial. Keterlambatan dalam pengurusan dokumen serta kurangnya inovasi dalam pelayanan menjadi faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa program penguatan manajemen pemerintahan yang mencakup pelatihan tata kelola, peningkatan kapasitas aparaturnya, serta strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan lokal, diharapkan pemerintahan kampung dapat lebih responsif, transparan, dan

efektif dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan masyarakat.

Mitra dalam program ini, yaitu Pemerintah Kampung Kelapa Lima, menghadapi berbagai permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik. Salah satu kendala utama adalah lemahnya kapasitas aparaturnya dalam manajemen administrasi dan pengelolaan anggaran. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme pengelolaan dana desa menyebabkan beberapa program pembangunan tidak berjalan optimal (Anisa, Noor, and Nugroho 2024). Selain itu, koordinasi antar perangkat kampung masih kurang efektif, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain aspek tata kelola, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh mitra. Kurangnya sosialisasi dan keterbukaan dalam penyusunan program kampung menyebabkan warga kurang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini berdampak pada rendahnya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih minim. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka (Rachmad et al. 2023).

Dari sisi pelayanan publik, mitra mengalami kendala dalam menyediakan layanan administratif yang cepat dan responsif. Kurangnya tenaga aparaturnya yang memiliki keterampilan dalam pelayanan berbasis digital serta minimnya fasilitas pendukung menjadi hambatan utama. Masyarakat sering mengeluhkan proses administrasi yang lambat dan kurang transparan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan dalam manajemen pemerintahan kampung melalui peningkatan kapasitas aparaturnya, penerapan sistem administrasi yang lebih efisien, serta strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung secara lebih aktif dan berkelanjutan.

Kesenjangan dalam manajemen pemerintahan Kampung Kelapa Lima terlihat dalam beberapa aspek utama, yaitu kapasitas aparatur, transparansi administrasi, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dibandingkan dengan kampung-kampung lain yang telah menerapkan sistem tata kelola berbasis teknologi informasi, pemerintahan Kampung Kelapa Lima masih mengandalkan metode konvensional dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan data, pengelolaan anggaran, serta pelaporan program yang berjalan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam keterbukaan informasi terkait kebijakan dan penggunaan dana desa, sehingga masyarakat kurang memiliki akses untuk mengetahui secara rinci alokasi anggaran serta progres pembangunan kampung. Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi kesenjangan yang signifikan, di mana minimnya sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah kampung menyebabkan warga kurang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan (Khalim and Hernawati 2024) (Setiadi, Mulyaningsih, and Ulumudin 2025). Padahal, di beberapa kampung yang memiliki sistem partisipasi yang lebih baik, keterlibatan masyarakat telah terbukti meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemerintahan desa.

Urgensi dari pengabdian ini sangat tinggi mengingat tata kelola pemerintahan yang tidak efektif akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Kampung Kelapa Lima. Jika tidak segera ditingkatkan, lemahnya manajemen pemerintahan dapat menghambat berbagai program pembangunan yang telah dirancang dan memperburuk kualitas layanan publik yang diterima masyarakat. Tanpa adanya intervensi yang konkret, potensi terjadinya ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran, ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya partisipasi warga akan semakin memperburuk situasi. Selain itu, dalam era digitalisasi saat ini, keterlambatan dalam adaptasi teknologi informasi dalam administrasi

kampung akan membuat pemerintahan semakin tertinggal dibandingkan daerah lain yang telah menerapkan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Oleh karena itu, program pengabdian ini menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah kampung dapat meningkatkan kapasitasnya, memperbaiki sistem pelayanan publik, dan menciptakan tata kelola yang lebih transparan serta akuntabel.

Kebaruan dalam program pengabdian ini terletak pada pendekatan inovatif yang mengintegrasikan pelatihan tata kelola berbasis teknologi, strategi peningkatan transparansi, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Program ini tidak hanya akan memberikan pelatihan bagi aparatur kampung dalam manajemen pemerintahan, tetapi juga akan memperkenalkan sistem administrasi digital sederhana yang dapat digunakan untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan data serta layanan publik. Selain itu, program ini akan mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat yang lebih sistematis, seperti forum diskusi dan survei aspirasi warga berbasis teknologi, sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah kampung lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan Kampung Kelapa Lima dapat memiliki tata kelola yang lebih efektif, modern, serta mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan Kampung Kelapa Lima melalui pelatihan berbasis teknologi, implementasi sistem administrasi digital, peningkatan transparansi, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan berkelanjutan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pengabdian masyarakat ini diawali dengan identifikasi dan analisis situasi guna memahami permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan Kampung Kelapa Lima. Proses ini



dilakukan melalui observasi langsung serta wawancara dengan aparaturnya kampung dan masyarakat untuk mengidentifikasi hambatan dalam administrasi pemerintahan, transparansi anggaran, serta tingkat partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terkait kebijakan desa dan laporan keuangan yang tersedia. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal yang akurat mengenai kondisi pemerintahan kampung sehingga program pengabdian dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik yang ada.

Setelah permasalahan teridentifikasi, tahap berikutnya adalah penyusunan program dan perancangan sistem guna meningkatkan efektivitas tata kelola kampung. Modul pelatihan disusun berdasarkan temuan awal dan berfokus pada peningkatan kapasitas aparaturnya dalam administrasi pemerintahan berbasis teknologi. Selain itu, sistem administrasi digital sederhana dirancang untuk mempercepat proses pencatatan data, pengelolaan anggaran, serta penyampaian informasi publik. Penyusunan sistem ini mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur teknologi di kampung dan kemampuan pengguna agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

Tahap implementasi dilakukan melalui pelatihan dan penerapan sistem administrasi digital kepada aparaturnya kampung. Pelatihan mencakup penggunaan teknologi dalam pengelolaan administrasi, manajemen keuangan desa, serta transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Aparaturnya kampung diberikan bimbingan teknis agar mampu mengoperasikan sistem yang diterapkan secara mandiri. Selain itu, sistem digital yang telah dirancang mulai diimplementasikan secara bertahap untuk memastikan adaptasi yang optimal. Dengan demikian, aparaturnya kampung dapat meningkatkan efektivitas kerja mereka serta meminimalisir hambatan administratif yang selama ini menghambat pelayanan publik.

Untuk memperkuat aspek partisipatif dalam tata kelola pemerintahan, dilakukan pemberdayaan

masyarakat melalui forum diskusi dan survei aspirasi berbasis teknologi. Forum ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan, kritik, dan evaluasi terhadap kebijakan kampung. Selain itu, survei berbasis digital diterapkan untuk mengumpulkan aspirasi warga secara lebih luas dan sistematis, sehingga pemerintah kampung dapat mengambil kebijakan berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi langsung dari masyarakat. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan demokratis.

Tahap akhir dari metode pengabdian ini adalah monitoring, evaluasi, dan pemberian rekomendasi guna memastikan keberlanjutan program. Evaluasi dilakukan melalui umpan balik dari aparaturnya kampung dan masyarakat terkait efektivitas pelatihan serta penerapan sistem digital. Analisis hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, rekomendasi disusun untuk meningkatkan keberlanjutan program serta memperkuat tata kelola kampung yang lebih modern, transparan, dan partisipatif. Dengan pendekatan ini, program pengabdian tidak hanya memberikan solusi jangka pendek tetapi juga membangun fondasi tata kelola pemerintahan kampung yang berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai hasil dari program pengabdian ini, terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Kampung Kelapa Lima, terutama dalam aspek efisiensi administrasi, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Peningkatan kapasitas aparaturnya kampung melalui pelatihan dan penerapan sistem administrasi digital telah membantu mempercepat proses pelayanan publik serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan semakin meningkat melalui mekanisme partisipatif yang diterapkan. Dengan adanya

perubahan ini, diharapkan pemerintahan kampung dapat berjalan lebih efektif, modern, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

**Tabel 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung**

| Hasil yang Dicapai                                                               | Indikator Keberhasilan                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan pemahaman aparatur tentang manajemen pemerintahan berbasis teknologi | Aparatur memahami dan mampu menerapkan sistem digital dalam administrasi kampung |
| Peningkatan keterampilan dalam pengelolaan administrasi dan perencanaan program  | Adanya dokumen perencanaan yang lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik  |

Tabel 1 bagaimana program pengabdian masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung, terutama dalam hal manajemen pemerintahan berbasis teknologi. Aparatur kampung diberikan pelatihan mengenai tata kelola administrasi yang lebih modern, termasuk penggunaan sistem digital untuk pencatatan dan pengelolaan data. Selain itu, keterampilan mereka dalam perencanaan program dan pengelolaan anggaran juga ditingkatkan, sehingga dokumen perencanaan menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi kerja pemerintah kampung.

**Tabel 2. Implementasi Sistem Administrasi Digital**

| Hasil yang Dicapai                                             | Indikator Keberhasilan                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Penerapan sistem digital dalam pencatatan administrasi kampung | Sistem administrasi berbasis digital mulai digunakan oleh aparatur kampung          |
| Peningkatan efisiensi layanan publik                           | Waktu pelayanan administrasi berkurang dan masyarakat lebih mudah mengakses layanan |

Tabel 2 menggambarkan bagaimana sistem digital sederhana diterapkan untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi di pemerintahan kampung. Dengan adanya sistem ini, pencatatan data warga, layanan administrasi seperti surat menyurat, serta pengelolaan anggaran menjadi lebih terstruktur dan transparan. Efisiensi dalam pelayanan publik juga meningkat karena masyarakat dapat mengurus administrasi dengan waktu yang lebih singkat dan tanpa prosedur yang berbelit-belit, sehingga pelayanan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

**Tabel 3. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan**

| Hasil yang Dicapai                                                  | Indikator Keberhasilan                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Masyarakat dapat mengakses informasi kebijakan dan anggaran kampung | Tersedianya platform atau media untuk transparansi informasi                   |
| Sistem pelaporan yang lebih akuntabel                               | Laporan keuangan dan program pembangunan kampung dapat diakses oleh masyarakat |

Tabel 3 bagaimana transparansi dalam pemerintahan kampung dapat ditingkatkan melalui penggunaan platform atau media publik untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan, anggaran, serta progres pembangunan. Sistem pelaporan yang lebih akuntabel juga diterapkan, di mana laporan keuangan dan hasil program pembangunan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan keterbukaan ini, masyarakat dapat lebih percaya terhadap pemerintahan kampung dan memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai arah pembangunan kampung mereka.

**Tabel 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

| Hasil yang Dicapai                                   | Indikator Keberhasilan                                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Terbentuknya forum diskusi dan survei aspirasi warga | Forum diskusi rutin dan survei berbasis teknologi diterapkan |
| Peningkatan keterlibatan warga                       | Masyarakat aktif berpartisipasi dalam                        |

dalam perencanaan musyawarah dan  
program kampung evaluasi program

Tabel 4 menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat ditingkatkan melalui forum diskusi, musyawarah kampung, dan survei berbasis teknologi. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terhadap kebijakan kampung secara lebih efektif. Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kebijakan pemerintah kampung, tetapi juga berperan aktif dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan tersebut, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

**Tabel 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Modern dan Berkelanjutan**

| Hasil yang Dicapai                                        | Indikator Keberhasilan                                                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pemerintahan kampung lebih adaptif terhadap teknologi     | Aparatur mampu mengelola sistem berbasis digital dengan baik              |
| Sistem pemerintahan yang lebih inovatif dan berkelanjutan | Tata kelola kampung lebih efektif dan mendukung pembangunan berkelanjutan |

Tabel 5 terkait tata kelola pemerintahan kampung semakin modern dengan penerapan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik. Aparatur kampung menjadi lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu mengelola sistem pemerintahan berbasis digital secara efektif. Dengan sistem yang lebih inovatif dan berkelanjutan, pemerintah kampung dapat merancang kebijakan jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada hasil saat ini tetapi juga memberikan manfaat bagi generasi mendatang, sehingga tercipta pembangunan kampung yang lebih maju dan sejahtera.

Dalam pengabdian ini, aparatur kampung mendapatkan pelatihan intensif terkait tata kelola pemerintahan yang efektif, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi

administrasi dan pelayanan publik. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek fundamental dalam manajemen pemerintahan desa, seperti sistem perencanaan pembangunan berbasis data, optimalisasi penggunaan anggaran, serta peningkatan kapasitas dalam menyusun laporan yang transparan dan akuntabel (Siahaan et al. 2025). Selain itu, aparatur juga dibekali dengan pemahaman mendalam tentang regulasi pemerintahan desa yang relevan agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dengan simulasi dan praktik langsung dalam pengelolaan administrasi berbasis digital (Syarifuddin, Yusuf, and Nurfarahim 2024). Salah satu program yang diterapkan adalah penggunaan sistem administrasi digital sederhana yang memungkinkan pencatatan dan pengarsipan dokumen secara lebih tertata dan efisien. Aparatur kampung diberikan bimbingan dalam menggunakan perangkat lunak administrasi yang dirancang untuk mempermudah pelaporan keuangan, pencatatan data kependudukan, serta monitoring program pembangunan desa. Dengan metode ini, aparatur kampung lebih siap dalam mengatasi berbagai tantangan administratif dan mampu meningkatkan efisiensi kerja mereka.

Hasil dari pelatihan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur kampung dalam menjalankan tugas mereka secara lebih profesional dan akuntabel. Aparatur yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan kini mampu mengelola anggaran dengan lebih sistematis dan transparan. Selain itu, komunikasi antara pemerintah kampung dan masyarakat juga mengalami perbaikan, di mana keterbukaan informasi semakin meningkat dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa menjadi lebih aktif (Hidayati and Suwanda 2022). Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan aparatur kampung dapat menjalankan pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.



Salah satu capaian utama dari program ini adalah pengembangan dan implementasi sistem administrasi digital sederhana yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pencatatan data kependudukan, pengelolaan anggaran, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sebelum adanya sistem ini, pencatatan dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik yang rentan terhadap kesalahan input, kehilangan data, serta keterlambatan dalam proses administrasi. Dengan adanya digitalisasi, aparaturnya kampung kini dapat mengakses dan memperbarui data dengan lebih cepat dan akurat, sehingga memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih sistematis dan mudah diakses (Yasir et al. 2024).

Penerapan sistem digital ini juga memberikan dampak positif terhadap pengelolaan anggaran kampung (Saidah, Khasanah, and Ridloah 2022). Sebelumnya, pencatatan dan pelaporan penggunaan dana desa masih bersifat konvensional dan kurang transparan, sehingga menyulitkan dalam proses audit serta evaluasi program pembangunan. Dengan sistem yang telah diterapkan, seluruh transaksi keuangan dapat tercatat secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah kampung. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi terkait anggaran dan program kampung, sehingga tercipta transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Selain mempermudah pengelolaan administrasi dan anggaran, implementasi sistem digital ini juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik (Ramadhani et al. 2024). Sebelumnya, masyarakat harus datang langsung ke kantor kampung untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, seperti pembuatan surat keterangan atau dokumen kependudukan lainnya. Namun, dengan adanya sistem ini, beberapa layanan dapat dilakukan secara daring, sehingga mengurangi antrian dan mempercepat proses pelayanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga mengoptimalkan waktu dan tenaga aparaturnya kampung dalam

memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Sebelum program pengabdian ini dilaksanakan, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan kampung masih tergolong rendah. Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai alokasi dana desa, pelaksanaan program pembangunan, maupun keputusan strategis yang dibuat oleh aparaturnya kampung (Horna 2024). Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung serta memunculkan potensi kesalahpahaman dan ketidakpuasan di kalangan warga. Selain itu, minimnya sistem pencatatan dan pelaporan yang efektif membuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi sulit, sehingga rawan terjadi ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya.

Sebagai solusi, program pengabdian ini mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital yang memungkinkan informasi terkait keuangan dan kebijakan kampung dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Sistem ini dirancang untuk mencatat setiap transaksi dan alokasi dana secara transparan, serta memberikan laporan berkala yang dapat dipantau oleh warga melalui media digital atau papan informasi kampung. Selain itu, melalui forum komunikasi publik yang diadakan secara berkala, masyarakat diberikan ruang untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta memberikan masukan terkait program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah kampung (Laowo et al. 2024). Upaya ini tidak hanya meningkatkan keterbukaan informasi, tetapi juga menciptakan mekanisme kontrol sosial yang lebih kuat dari masyarakat terhadap pemerintah kampung.

Dampak dari implementasi sistem ini terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya kampung. Dengan adanya transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan kebijakan, masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan (Liani, Takari, and Ompusunggu 2024). Akuntabilitas aparaturnya kampung juga semakin

meningkat karena setiap kebijakan dan penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, keterbukaan informasi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi serta memberikan saran terhadap program yang dijalankan, sehingga tata kelola pemerintahan kampung menjadi lebih efektif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Sebelum program pengabdian ini dilaksanakan, partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan kampung masih tergolong rendah. Banyak warga merasa bahwa aspirasi mereka kurang didengar atau tidak memiliki dampak nyata dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya keterlibatan warga. Musyawarah yang dilakukan sering kali hanya dihadiri oleh segelintir pihak, sehingga keputusan yang diambil belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, program ini memperkenalkan mekanisme keterlibatan masyarakat berbasis teknologi, seperti survei aspirasi digital dan forum diskusi terbuka. Survei digital memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka secara langsung tanpa harus hadir secara fisik (Mokobombang et al. 2023), sehingga lebih inklusif dan menjangkau kelompok yang sebelumnya sulit terlibat, seperti pekerja dan ibu rumah tangga. Selain itu, forum diskusi terbuka yang dilakukan secara rutin memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan masukan dan mendiskusikan berbagai kebijakan secara langsung dengan aparat kampung. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan kampung.

Hasil dari inisiatif ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam menyampaikan ide, kritik,

dan kebutuhan mereka, yang pada akhirnya membuat kebijakan dan program yang dirancang lebih sesuai dengan kondisi dan harapan warga. Selain itu, peningkatan partisipasi ini juga berdampak pada meningkatnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan, sehingga proses pembangunan kampung dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa dapat ditingkatkan secara signifikan (Tarigan, Harahap, and Kusmanto 2024).

Implementasi pengabdian masyarakat di Kampung Kelapa Lima telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem tata kelola pemerintahan. Peningkatan kapasitas aparat kampung melalui pelatihan dan pendampingan teknis memberikan dampak positif terhadap efisiensi kerja dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Aparatur kampung kini lebih memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam menjalankan pemerintahan desa. Selain itu, penerapan sistem administrasi digital telah mengurangi berbagai kendala yang sebelumnya muncul akibat sistem manual, seperti keterlambatan pencatatan data, ketidaktepatan dalam pelaporan anggaran, serta kesulitan dalam mengakses informasi terkait kebijakan kampung.

Perubahan signifikan juga terlihat dalam peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan kampung. Sebelum program ini berjalan, masyarakat cenderung pasif dan kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Namun, dengan adanya platform komunikasi terbuka, survei aspirasi digital, serta forum diskusi berkala, masyarakat kini memiliki akses lebih luas untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini menciptakan suasana pemerintahan yang lebih demokratis dan berbasis partisipasi aktif warga. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung meningkat karena mereka dapat melihat langsung bagaimana kebijakan dan anggaran dikelola secara lebih

transparan dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Keberlanjutan dari program ini menjadi aspek utama yang terus dikembangkan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang. Pemerintah kampung diharapkan dapat mengadopsi model tata kelola berbasis digital ini secara permanen dan terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti akademisi, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil, menjadi langkah strategis untuk mendukung pengembangan lebih lanjut. Dengan sistem pemerintahan yang lebih modern dan adaptif, Kampung Kelapa Lima dapat menjadi contoh bagi kampung-kampung lain dalam menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

## KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan kapasitas aparatur Kampung Kelapa Lima dalam tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan. Implementasi sistem administrasi digital telah mempercepat proses pelayanan publik dan meningkatkan akurasi pencatatan data, sementara mekanisme pelaporan berbasis teknologi memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum diskusi dan survei aspirasi digital menunjukkan adanya perubahan positif dalam keterlibatan warga dalam pembangunan kampung. Secara keseluruhan, pengabdian ini telah mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat menjadi model bagi kampung lain dalam mengadopsi pendekatan serupa.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada aparaturnya Kampung Kelapa Lima dan seluruh masyarakat Kampung Kelapa Lima, Kabupaten Merauke, atas dukungan, partisipasi, dan kerja sama yang luar biasa dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Tanpa keterbukaan, semangat kolaborasi, serta komitmen dari semua pihak, program ini tidak akan dapat berjalan dengan optimal. Kami sangat menghargai dedikasi aparaturnya kampung dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan serta antusiasme masyarakat dalam berkontribusi terhadap pembangunan kampung yang lebih transparan, efektif, dan berkelanjutan. Semoga hasil dari program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan Kampung Kelapa Lima dan menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Bunga Milena Noer, Iqbal Noor, and Gatot Wahyu Nugroho. 2024. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jampangkulon." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3(3):1665–87.
- Hidayati, Ririn, and I. Made Suwanda. 2022. "Upaya Pemerintah Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Media Center Surabaya Sebagai Wujud Good Governance." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 10(4):824–41.
- Horna, Manuel. 2024. "Peran Kepala Kampung Dalam Implementasi Kebijakan Dana Kampung Distrik Manimeri." *Lentera: Multidisciplinary Studies* 2(2).
- Khalim, Abdul, and Yuke Hernawati. 2024. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kampung Arab Panjunan Kota Cirebon." *ECo-Buss* 7(1):435–47.
- Laowo, Erna Ningsih, Fatolesa Hulu, Palindungan Lahagu, and Syah Abadi Mendrofa. 2024. "Analisis Fungsi Koordinasi Kepala Desa Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi." *Visi Sosial Humaniora* 5(2):232–52.
- Liani, Yully, Dedi Takari, and Dicky Perwira Ompusunggu. 2024. "Analisis Efektivitas

- Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022." *Jurnal Syntax Admiration* 5(11):4810–25.
- Mokobombang, Wahyudi, Syafaruddin Syafaruddin, Andi Riska Andreani Syafaruddin, Khaeriyah Khaeriyah, and Nurasia Natsir. 2023. "Dampak Perubahan Layanan Publik Yang Disebabkan Oleh Teknologi Dan Media Sosial." *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 4(1):348–59.
- Mukhlis, Mukhlis. 2024. "Optimalisasi Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Mengatasi Penanggulangan Darurat Sampah Tpa Regional Payakumbuh." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5(4):11964–76.
- Rachmad, Alfarid Fadhil, Ezra Azaria, Qika Nur Xusan, and Nabillah Azzahra. 2023. "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16(02):75–88.
- Ramadhani, Rizka, Muhammad Abdillah, Iwan Santoso, Yosvico Destrio, Danu Hadi, and Akbar Maulana. 2024. "INOVASI E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK: STUDI KASUS INOVASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER." *Interelasi* 1(2):62–79.
- Saidah, Nur, Lailatul Khasanah, and Siti Ridloah. 2022. "Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan Dalam Mendukung Program Smart Village." *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 6(2):123–35.
- Setiadi, Ade, Mulyaningsih Mulyaningsih, and Aceng Ulumudin. 2025. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Citengah Kec. Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang." *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 7(1):58–79.
- Siahaan, Septony, Dompok Pasaribu, Wesly Andri Simanjuntak, and SUNDAY A. D. E. SITORUS. 2025. "Penerapan Pola Peran Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Desa Melalui Sistem Informasi Manajemen." *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 6(1):1–16.
- Syarifuddin, Abdul Kahar, Muhamad Yusuf, and Wa Ode Adinda Nurfarahim. 2024. "Kreativitas Dalam Pendidikan Nonformal Melalui Program Pengembangan Potensi Masyarakat Islam." *JPW: Jurnal Pengabdian Wakaaka* 3(2):39–49.
- Tamba, Wahyu Pratama, and Sari Viciawati Machdum. 2024. "Kajian Reflektif Pelaksanaan Program Kampung Deret Di Jakarta." *Journal of Urban Sociology* 1(2):94–111.
- Tarigan, Ridawaty, R. Hamdani Harahap, and Heri Kusmanto. 2024. "Tata Kelola BUMDes Gajah Mandiri Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairidalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa." *PERSPEKTIF* 13(4):994–1003.
- Yasir, Toriq Alfian, Tegar Alfarisy, Yeni Widya Kartika, Mareta Julia Saputri, Fathul Nurul Azmi, Intan Rodiah Safitri, Devi Yanto, Lusi Handayani, Amrina Rossada, and Muhammad Iman Darmawan. 2024. "Pelatihan Sistem Informasi Kependudukan Untuk Peningkatan Efisiensi Pencatatan Data Penduduk Desa Darmasari Melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa." *Jurnal Teknologi Informasi Untuk Masyarakat* 2(2):91–102.